



KEUANGAN

Pengelolaan Aset Daerah

SEMUA daerah di Kalimantan Barat masih bermasalah terhadap pengelolaan aset. Masalah itu juga yang membuat sebagian daerah sulit mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). "Terus terang saja ini menjadi beban kami (BPK)," kata Joni Rindra Putra, Kepala Sub Auditorat BKP RI Perwakilan Kalbar.

BPK mengaku sering memberikan peringatan dan masukan kepada daerah agar mengelola aset dengan baik.

◆ Ke Halaman 15 kolom 1

Pengelolaan Aset Daerah

Sambungan dari halaman 9

Namun, banyak daerah tidak menindaklanjuti sehingga pada penilaian laporan keuangan setiap tahunnya tidak jarang masalah yang sama ditemui. "Padahal kami sudah berulang-ulang sampaikan masalah pada daerah tersebut, tolong tindaklanjuti aset. Kenyataannya sering itu tidak ditindaklanjuti. Kadang kami sendiri agak kecewa juga, apa sih yang telah mereka lakukan," ujar Joni.

Dua hari lalu BPK RI Perwakilan Kalbar menyerahkan berdasarkan hasil audit terdahulu laporan keuangan tahun 2013 kepada Kota Pontianak,

mendasikan untuk membentuk tim penilaian atau pada aset lainnya dibentuk tim inventarisasi. Namun, pada kenyataannya ada daerah yang tidak melakukannya. "Kami sarankan bentuk tim tetapi pada kenyataannya tidak dibentuk," paparnya.

Pada dasarnya pengelolaan aset adalah bagian dari administrasi. Akan tetapi jika administrasi tidak baik akan berpengaruh terhadap tata pengelolaan keuangan. Untuk itu BPK sangat menekankan agar dikelola dengan baik karena aset merupakan kekayaan terbesar yang dimiliki pemerintah daerah.

"Memang sebagian besar

masalah aset bukan berkaitan dengan penyimpangan, tetapi ini sangat penting," ungkap Joni. "Kalau ini dikelola dengan baik insyaallah opini yang diberikan lebih baik pula," tambahnya.

Daerah yang mendapat opini WTP pun belum tentu pengelolaan asetnya 100 persen genah. Akan tetapi BPK menganggapnya dapat ditoleransi. Ada batasan-batasan yang tidak dilanggar. "Ketika pada suatu masalah sudah baik muncul lagi masalah di bagian lain. Yang WTP pun demikian. Jadi tidak harus 100 persen tetapi masih dalam batas toleransi," katanya. **(hen)**